



PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan hidayahnya jualah dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan RENJA Tahun 2025 Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas segala dukungan dan bantuannya pada saat penyusunan Perubahan RENJA Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025.

Penulis menyadari bahwa Perubahan RENJA 2025 ini jauh dari sempurna, oleh karenanya dengan rasa hormat Penulis mengharapkan koreksi dan saran untuk dapat menyempurnakan Perubahan RENJA 2025 Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dimasa yang akan datang

Demikian Perubahan RENJA Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara ini dibuat, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Gunungtua, 28 Juli 2025



**Pt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**M. KADDAFI NASUTION, S.STP, MM
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP. 19840824 200312 1 001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Perhubungan Sampai Dengan Triwulan II	6
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	34
3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Dinas Perhubungan	34
3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah	34
3.3 Program dan Kegiatan	34
BAB IV PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Dinas Perhubungan Sampai Dengan Triwulan II-----	7
Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan -----	30
Tabel 3.1 Tabel Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2025 -----	36

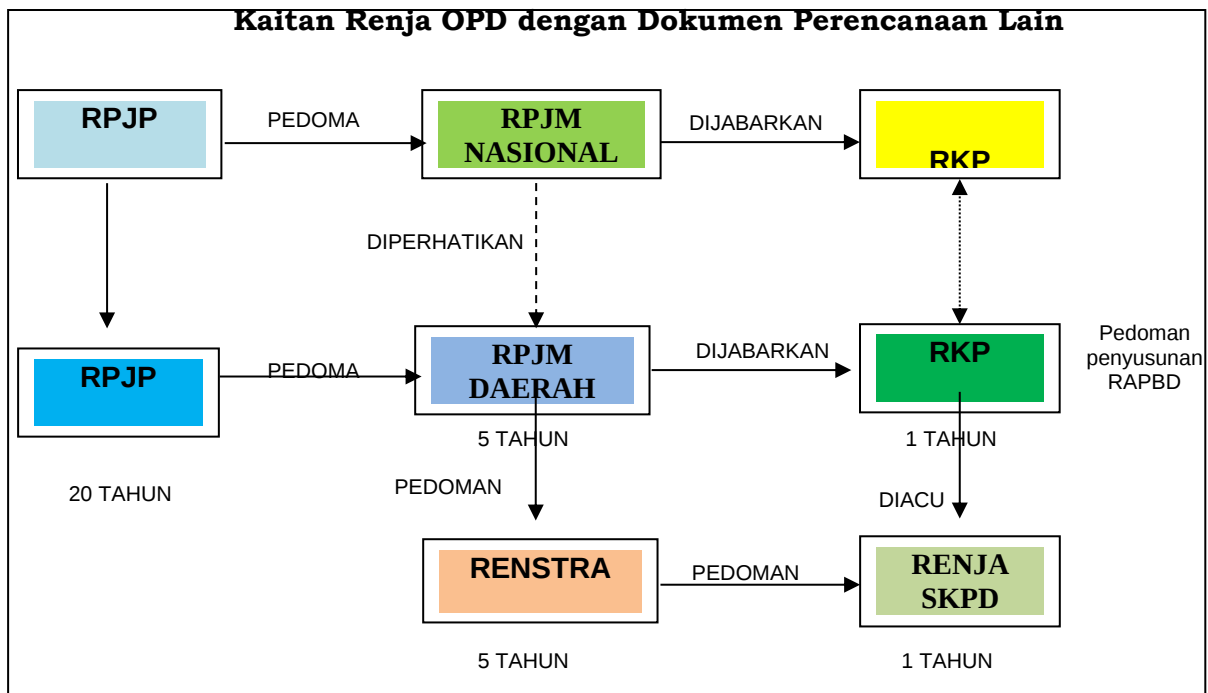
BAB I P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya dalam rencana strategis dapat tercapai dengan baik. Selain itu dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perhubungan ini diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun sebagaimana telah tercantum dalam rencana strategis. Sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru di lingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

Perencanaan kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan. Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target realistis. Oleh karena itu dalam Perubahan Renja ini akan dicantumkan program dan kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah langkah kegiatan yang akan dilaksanakan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal. Keterkaitan antara Rencana Kerja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/ Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :

Bagan 1.1



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2025 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nom0r 104, Tambahan Lembaran Nomor 4421) ;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 Nomor 440, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara 2015-2035;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
14. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026;
15. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 01 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 adalah :

1. Mewujudkan kondisi umum pembangunan di Bidang Perhubungan di Kabupaten Padang Lawas Utara;
2. Melaksanakan kebijakan pembangunan Perhubungan di Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Melaksanakan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan sampai Triwulan II

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Perhubungan
- 3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PERHUBUNGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi.

Untuk lebih jelas hasil evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kaupaten Padang Lawas Utara tahun 2025 (Triwulan II) dapat dilihat dalam table dibawah ini.

TABEL 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2025 (TW II)
Kab. Padang Lawas Utara

KODE REKENING							Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi			Target Program dan Kegiatan (Renja-Perangkat Daerah) tahun 2025		Prakiran Realisasi Capaian target rentra SKPD s/d tahun						
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (TW II)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun	Tingkat capaian realisasi Target Renstra (%)					
1							2	3	4		5		6	7		8=(7/6)		9	10=(5+7+9)		11=(10/4)	
2	1	5	0	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	100													
2	1	5	0	1	2	0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		Sub Kegiatan	2	Sub Kegiatan	4	Sub Kegiatan		4	Sub Kegiatan	6	Sub Kegiatan		
2	1	5	0	1	2	0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	0	Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00
2	1	5	0	1	2	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	#DIV/0!

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

								Dokumen RKA-SKPD													
2	15	01	2	01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	2	Dokumen	#DIV/0!
2	15	01	2	01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	3	Laporan	300.00
2	15	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah kegiatan administrasi keuangan daerah	3	Sub Kegiatan	3	Sub Kegiatan	3	Sub Kegiatan	3	Sub Kegiatan	100	3	Sub Kegiatan	9	Sub Kegiatan	300.00

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

2	1	0	2	0	0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	204	OB	102	OB	216	OB	34	OB	15.74074	48	OB	184	OB	90.20
2	1	0	2	0	0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	Dokumen	0.00
2	1	0	2	0	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	Dokumen	300.00
2	1	0	2	0	0	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran		Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	4	Sub Kegiatan	1	Sub Kegiatan	25	1.00	Sub Kegiatan	2	Sub Kegiatan	

								tugas dan fungsi OPD															
2	15	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	3	Paket	300.00		
2	15	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	Orang	0	Orang	100	Orang	0	Orang	0	0	Orang	0	Orang	0.00		
2	15	01	2	05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang	0	Orang	100	Orang	0	Orang	0	0	Orang	0	Orang	0.00		
2	15	01	2	05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Orang	0	Orang	1	Orang	0	Orang	0	0	Orang	0	Orang	0.00		
2	15	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah		Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	7	Sub Kegiatan	2	Sub Kegiatan	29	1	Sub Kegiatan	3	Sub Kegiatan			

2	1	0	2	0	0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100	0	Paket	2	Paket	200.00
2	1	0	2	0	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Paket	0	Paket	3	Paket	0	Paket	0	0	Paket	0	Paket	0.00
2	1	0	2	0	0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0	0	Paket	0	Paket	0.00
2	1	0	2	0	0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	0	Paket	2	Paket	0	Paket	0	0	Paket	0	Paket	0.00
2	1	0	2	0	0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	0	Paket	1	Paket	0	Paket	0	0	Paket	0	Paket	0.00
2	1	0	2	0	0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	Dokumen	0.00

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

[illegible]

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

2	1	0	2	0	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45	Unit	0	Unit	1	Unit	0	Unit	0	0	Unit	0	Unit	0.00
2	1	0	2	0	0	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	0	Unit	1	Unit	0	Unit	0	0	Unit	0	Unit	0.00
2	1	0	2	0	0	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	0	Unit	0	Unit	0.00
2	1	0	2	0	0	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	45	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	0	Unit	0	Unit	0.00
2	1	0	2	0	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	3	Sub Kegiatan	1	Sub Kegiatan	33.3333	2	Sub Kegiatan	3	Sub Kegiatan	

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

2	15	01	2	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0	0	Laporan	0	Laporan	0.00
2	15	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	0	Laporan	2	Laporan	0	Laporan	0	3	Laporan	3	Laporan	25.00
2	15	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	5	Laporan	12	Laporan	5	Laporan	41.67	3	Laporan	13	Laporan	108.33
2	15	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemelihara an barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	6	Sub Kegiatan	0	Sub Kegiatan	0.00	1	Sub Kegiatan	1	Sub Kegiatan	0.00
2	15	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	15	Unit	0	Unit	6	Unit	5	Unit	83.33	15	Unit	20	Unit	133.33

						Operasional atau Lapangan	Pajak dan Perizinanny a											
2	1	0	2	0	0	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0.00
2	1	0	2	0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0.00
2	1	0	2	0	0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita s	1	Unit	0	Unit	1	Unit	0	Unit	0	Unit	0.00
2	1	0	2	0	0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si	4	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0.00

2	1	0	2	0	0	0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilita si	1	Unit	0	Unit	1	Unit	0	Unit	0	0	Unit	0	Unit	0.00
2	1	0	2	2			PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pelayanan Perhubung an yang berkualitas														
2	1	0	2	0	1		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Ko ta	Peningkata n Penetapan Rencana INDUK Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota		Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	3	Sub Kegiatan	0	Sub Kegiatan		1	Sub Kegiatan	1	Sub Kegiatan	
2	1	0	2	0	0	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kot a	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokume n	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	Dokumen	0.00

2	15	02	2	01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0.00	
2	15	02	2	01	0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	12	Laporan	5	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0.00	3	Laporan	8	Laporan	66.67
2	15	02	2	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Jenis Perlengkapan Jalan yang diadakan		Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	4	Sub Kegiatan	1	Sub Kegiatan		1.00	Sub Kegiatan	2	Sub Kegiatan	
2	15	02	2	02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	50	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	0	Unit	0	Unit	0.00
2	15	02	2	02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	100	Unit	0	Unit	38	Unit	0	Unit	0	0	Unit	0	Unit	0.00

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

2	15	02	2	02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0.00	
2	15	02	2	02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	162	Unit	0	Unit	162	Unit	110	Unit	67.90	40	Unit	150	Unit	92.59
2	15	02	2	03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pembangunan Terminal Tipe C		Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	1	Sub Kegiatan	0	Sub Kegiatan		0	Sub Kegiatan	0	Sub Kegiatan	
2	15	02	2	03	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	Dokumen	0.00
2	15	02	2	04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Pembangunan Fasilitas Parkir di Kab. Padang Lawas Utara		Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	2	Sub Kegiatan	1	Sub Kegiatan		0	Sub Kegiatan	1	Sub Kegiatan	

2	1	0	2	0	0	0	0	0	1	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraa n dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kot a dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelengga raan dan Terbangunn ya Fasilitas Parkir Kewenanga n Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokume n	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	Dokumen	0.00
2	1	0	2	0	0	0	0	0	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraa n dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaa n Izin Penyelengga raan dan Terbangunn ya Fasilitas Parkir Kewenanga n Kabupaten/ Kota	0	Laporan	0	Laporan	12	Laporan	5	Laporan	41.67	0	Laporan	5	Laporan	0.00

2	1	0	2	0		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	6	Sub Kegiatan	0	Sub Kegiatan		0	Sub Kegiatan	0	Sub Kegiatan	
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	0	Unit	0	Unit	0.00
2	1	0	2	0	0	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	0	Orang	0	Orang	0.00
2	1	0	2	0	0	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	0	Unit	0	Unit	0.00
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	Dokumen	0.00

								Kendaraan Bermotor													
2	15	02	2	05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	1	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	0	Unit	0	Unit	0.00
2	15	02	2	05	0008	Koordinasi Penyelenggara n Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelengga raan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	0	Laporan	0	Laporan	0.00
2	15	02	2	06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Peningkata n Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas		Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	4	Sub Kegiata n	1	Sub Kegiatan		2	Sub Kegiatan	3	Sub Kegiatan	
2	15	02	2	06	0001	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kot a	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokume n	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	Dokumen	0.00

2	1	0	2	0	0	0	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	36	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	5	Laporan	41.67	1	Laporan	18	Laporan	50.00
2	1	0	2	0	0	1	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	0	Laporan	0	Laporan	0.00
2	1	0	2	0	0	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0	1	Laporan	1	Laporan	100.00
2	1	0	2	0	7		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalulintas (Andalalin) untuk Jalan		Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	2	Sub Kegiatan	1	Sub Kegiatan		2	Sub Kegiatan	3	Sub Kegiatan	

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

[illegible]

2	1	0	2	0	0	0	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0	0	Laporan	0	Laporan	0.00
2	1	0	2	2	0	9	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang/ atau barang		Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	2	Sub Kegiatan	1	Sub Kegiatan		0.00	Sub Kegiatan	1	Sub Kegiatan	
2	1	0	2	2	0	0	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	2	Laporan	1	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	50	0	Laporan	2	Laporan	100.00

2	1	0	2	0	0	0	0	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	100	Unit	0	Unit	100	Unit	0	Unit	0	0	Unit	0	Unit	0.00
2	1	0	2	1	1	1	1	1	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	1	Sub Kegiatan	0	Sub Kegiatan	0	0	Sub Kegiatan	0	Sub Kegiatan	
2	1	0	2	1	1	1	1	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	Dokumen	0.00

							Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	2	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	0.00	Sub Kegiatan	0	Sub Kegiatan	
2	1	0	2	1	0	0	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0.00
2	1	0	2	1	0	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0.00

2	1	0	2	1	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penertiban izin penyelenggaraan angkutan orang		Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	2	Sub Kegiatan	0	Sub Kegiatan		0.00	Sub Kegiatan	0	Sub Kegiatan	
2	1	0	2	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0	0	Laporan	0	Laporan	0.00

2	15	02	2	14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaa n Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenanga n Kabupaten/ Kota	1	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0	0	Laporan	0	Laporan	0.00
2	15	01	2	16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota		Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	2	Sub Kegiatan	0	Sub Kegiatan	0.00	Sub Kegiatan	0	Sub Kegiatan		

2	15	02	2	16	002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	JJumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	0.00	Dokumen	0	Dokumen	0.00
2	15	02	2	16	003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Laporan	0	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0	0	Laporan	0	Laporan	0.00

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN
KAB. PADANG LAWAS UTARA

No	Indikator	SMP/ Standar Nasional	IKK	Target Tenstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Rasio konektivitas Kabupaten		(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Kinerja Lalu lintas Kabupaten/ Kota		Volume Lalu Lintas/ Kapasitas Lalu lintas	0.79	0.75	0.70	0.79	0,13	1	0.79	0.75	0.70	
NO	Indikator		IKU										
1	Peningkatan Kualitas Angkutan		Jumlah Angkutan Laik Jalan/Jumlah Angkutan Wajib Laik Jalan	40%	45%	50%	32%	31,64%	32,25%	40%	45%	50%	
2	Peningkatan Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas		Realiasi jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalu lintas/ Target Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Keselamatan Lalu lintas	8%	50%	42%	8%	42%	42%	8%	50%	42%	
3	Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan		Realiasasi Jumlah Sarana dan Prasana perhubungan/Target Jumlah Sarana dan Prasana perhubungan	20%	40%	40%	0%	20%	20%	20%	40%	40%	

TABEL 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN
KAB. PADANG LAWAS UTARA

No	Indikator	SMP/ Standar Nasional	IKK	Target Tenstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Th 2024	Th 2025	Th 2026	Th 2024	Th 2025	Th 2026	Th 2024	Th 2025	Th 2026	
1	Rasio konektivitas Kabupaten		(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	1	1	1	1						
2	Kinerja Lalu lintas Kabupaten / Kota		Volume Lalu Lintas/ Kapasitas Lalu lintas	0,8	0,7	0,6							
3	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum		Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah	6500	6600	6700							
4	Rasio Izin Trayek		Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan /Jumlah penduduk	0.001 38	0.001 38	0.001 38							
5	Jumlah Uji KIR angkutan Umum		Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	30	50	60							
6	Jumlah Pelabuhan Udara dan Terminal Bis		Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	0	0	1							
7	Persentase layanan angkutan darat		Jumlah angkutan darat /Jumlah penumpang angkutan darat x100%	0.058 2	0.061 6	0.069 3							

8	Persentase kepemilikan KIR angkutan Umum		Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada Tahun n Jumlah angkutan umum pada Tahun n x100%	0.08	0.13	0.15							
9	Pemasangan rambu-rambu		Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia x100%	0.33	0.40	0.47							
10	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan		Panjang Jalan/ Jumlah Kendaraan	0.131	0.131	0.131							
11	Jumlah Orang/ Barang yang terangkut angkutan umum		Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	78000	78200	78250							
12	Jumlah Orang/ Barang melalui dermaga/ bandara/ Terminal per Tahun		Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara /terminal per tahun	0	0	0							
NO	Indikator		IKU										
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP Perangkat Daerah			64,52	69,52	74,52	65,95						

2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	78,50	80,50	82,50	86,08						
3	Persentase Kendaraan umum yang Laik Uji		$= \frac{\text{Total Jumlah Kendaraan yang diuji per tahun}}{\text{Total Jumlah kendaraan wajib uji}} \times 100\%$	20%	30%	35%	7,002 %						

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran PERUBAHAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN

Sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam bidang Perhubungan dituntut adanya peningkatan kinerja dan kualitas aparatur pada Dinas Perhubungan untuk mewujudkan terciptanya tata ke-Pemerintahan yang baik (Good Government) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government).

Adapun yang menjadi Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut :

Tujuan : *“Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Bidang Urusan Perhubungan”*

Sasaran : *“Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan di Dinas Perhubungan”*

3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menguraikan Kebijakan Nasional berupa arah Kebijakan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN maupun yang dirumuskan dalam RKP. Disamping itu juga penelaahan mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan. Untuk itu yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan propinsi untuk tahun 2025 yang terkait dengan pembangunan daerah Kabupaten/Kota (sesuai peremendagri RKPD 2023)

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai komitmen untuk menciptakan masyarakat Padang Lawas Utara yang patuh dan taat terhadap Peraturan berlalu lintas dan keselamatan pengguna jasa angkutan darat serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penggunaan sarana perhubungan. Dinas Perhubungan mempunyai 2 Program, 12 Kegiatan yaitu :

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
- 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah*
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

b. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

- 1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota*
- 2. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir*
- 3. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*
- 4. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota*
- 5. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*
- 6. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*

maka disusunlah rencana kegiatan dan program Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai berikut :

TABEL 3.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2025

N O	K O D E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / M / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/B erkurang (10- 12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKAT IF (Rp)	
							SEB ELU M	SESUD AH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERHUBUNGAN							7,324,074, 278	7,277,13 4,218	7,557,052, 392	232,978,114							6,184,36 3,991	
	2	URUSAN PEMERIN TAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAIT AN DENGAN PELAYAN AN DASAR							7,324,074, 278	7,277,13 4,218	7,557,052, 392	232,978,114							6,184,36 3,991	
	2.15	URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG PERHUB UNGAN							7,324,074, 278	7,277,13 4,218	7,557,052, 392	232,978,114							6,184,36 3,991	
1.	2.15 .01	PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/k ota				33.8 1 %	33.81 %	2,874,987, 278	2,832,06 6,218	2,614,268, 192	1,070,376,713							3,945,36 3,991	

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

	2.15 .01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</i>				4 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	26,057,800	23,701,800	16,635,200	-9,422,600			-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Perhubungan		5,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15 .01. 2.01 .000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	20,579,800	18,223,800	13,543,800	-7,036,000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			3,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15 .01. 2.01 .000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			500,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15 .01. 2.01 .000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			500,000	DINAS PERHUBUNGAN

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

2.15 .01. 2.01 .000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Lap oran	1 Lapora n	5,478,000	5,478,00 0	3,091,400	-2,386,600	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			500,000	DINAS PERHUBUN GAN
2.15 .01. 2.02	Administra si Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah kegiatan administrasi keuangan daerah				3 Sub Kegiata n	3 Sub Kegiata n	1,893,835, 178	1,846,89 5,318	1,786,244, 292	-107,590,886			-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Perhub ungan		2,078,42 2,791	DINAS PERHUBUN GAN
2.15 .01. 2.02 .000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				216 Ora ng/ bula n	209 Orang/ bulan	1,763,675, 178	1,716,73 5,318	1,753,580, 892	-10,094,286	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			2,037,42 2,791	DINAS PERHUBUN GAN
2.15 .01. 2.02 .000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	125,160,000	125,160,000	28,980,000	-96,180,000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			40,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	3,683,400	-1,316,600	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			1,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD				4 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	30,396,400	65,146,000	40,593,000	10,196,600			-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Perhubungan		81,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	30,396,400	65,146,000	40,593,000	10,196,600	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			80,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				100 Orang	0 Orang	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.001.0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	0 Orang	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			500,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.001.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	0 Orang	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			500,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah				7 Sub Kegiatan	6 Sub Kegiatan	284572700	256197900	106696700	-177876000			-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Perhubungan		162,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.000.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Pak et	1 Paket	4,485,800	4,485,800	4,485,800	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			1,000,000.0	DINAS PERHUBUN GAN
	2.15 .01. 2.06 .000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Pak et	3 Paket	44,218,700	38,890,700	22,210,600	-22,008,100	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			29,500,000	DINAS PERHUBUN GAN
	2.15 .01. 2.06 .000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Pak et	0 Paket	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	-			1,000,000	DINAS PERHUBUN GAN
	2.15 .01. 2.06 .000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Pak et	2 Paket	35,850,000	28,680,000	4,780,000	-31,070,000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			20,000,000	DINAS PERHUBUN GAN

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

2.15 .01. 2.06 .000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Pak et	1 Paket	37,305,40 0	31,288,6 00	10,482,70 0	-26,822,700	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			20,000,0 00	DINAS PERHUBUN GAN
2.15 .01. 2.06 .000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dok ume n	1 Dokum en	17,610,00 0	17,610,0 00	17,610,00 0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			1,000,00 0	DINAS PERHUBUN GAN
2.15 .01. 2.06 .000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
		Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Lap oran	40 Lapora n	145,102,8 00	135,242, 800	47,127,60 0	-97,975,200	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			90,000,0 00	DINAS PERHUBUN GAN
2.15 .01. 2.07	Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Jumlah kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				7 Sub Kegi atan	0 Sub Kegiata n	0	0	0	0			-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Perhub ungan		500,000	DINAS PERHUBUN GAN

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

2.15 .01. 2.07 .000 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			0	DINAS PERHUBUN GAN
2.15 .01. 2.07 .000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			500,000	DINAS PERHUBUN GAN
2.15 .01. 2.07 .000 5	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			0	DINAS PERHUBUN GAN
2.15 .01. 2.07 .000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			0	DINAS PERHUBUNGAN

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

	2	ON URUSAN							73240742 78	7277134 218	75570523 92	232978114							6184363 991	
	2.15	URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG XX							73240742 78	7277134 218	75570523 92	232978114							6184363 991	
	2.15 .01. 2.07 .001 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	2	URUSAN PEMERIN TAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAIT AN DENGAN PELAYAN AN DASAR							7,324,074, 278	7,277,13 4,218	7,557,052, 392	232,978,114							6,184,36 3,991	
	2.15	URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG PERHUB UNGAN							7,324,074, 278	7,277,13 4,218	7,557,052, 392	232,978,114							6,184,36 3,991	
	2.15 .01. 2.08	Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				3 Sub Kegi atan	3 Sub Kegiata n	445,195,2 00	445,195, 200	526,989,0 00	81,793,800			-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		1,476,94 1,200	DINAS PERHUBUN GAN
	2.15 .01. 2.08 .000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Lap oran	1 Lapora n	4,500,000	4,500,00 0	1,500,000	-3,000,000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			1,000,00 0	DINAS PERHUBUN GAN

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

2.15 .01. 2.08 .000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Lap oran	2 Lapora n	55,920,00 0	55,920,0 00	55,920,00 0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			35,941,2 00	DINAS PERHUBUN GAN
2.15 .01. 2.08 .000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Lap oran	12 Lapora n	384,775,2 00	384,775, 200	469,569,0 00	84,793,800	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			1,440,00 0,000	DINAS PERHUBUN GAN
2.15 .01. 2.09	Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Peningkatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah					6 Sub Kegi atan	1 Sub Kegiata n	194,930,0 00	194,930, 000	137,110,0 00	-57,820,000			-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Perhub ungan		141,000, 000	DINAS PERHUBUN GAN
2.15 .01. 2.09 .000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan					5 Unit	5 Unit	194,930,0 00	194,930, 000	137,110,0 00	-57,820,000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			140,000, 000	DINAS PERHUBUN GAN

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

			Pajak dan Perizinannya																
	2.15 .01. 2.09 .000 5	Pemeliharaan Mebel																	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		500,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15 .01. 2.09 .000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15 .01. 2.09 .000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				1 Unit	0 Unit	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		500,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	ON URUSAN							7324074278	7277134218	7557052392	232978114						6,184,363,991	

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

	2.15	URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG XX						7324074278	7277134218	7557052392	232978114							6,184,363,991	
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
	2	URUSAN PEMERIN TAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7,324,074,278	7,277,134,218	7,557,052,392	232,978,114							6,184,363,991	
	2.15	URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						7,324,074,278	7,277,134,218	7,557,052,392	232,978,114							6,184,363,991	
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi					0 Unit	0 Unit	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				0 Unit	0 Unit	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			0	DINAS PERHUBUNGAN
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pelayanan Perhubungan yang berkualitas				33,68 Persen	33,68 %	4449087000	4445068000	4942784200	-2210087000							2239000000	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				33,33 Persen 3 Sub Kegiatan	0 %	0	0	0	0			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kab. Padang Lawas Utara		3000000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			1,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			1,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

2.15 .02. 2.01 .000 7	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				0 Lap oran	0 Lapora n	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengemban gan infrastruktur dan meningkatka n lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausaha an, mengemban gkan industri kreatif serta mengemban gkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			1,000,00 0	DINAS PERHUBUN GAN
2.15 .02. 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Peningkatan Jenis Perlengkapan Jalan yang diadakan				4 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	26321440 00	2631125 000	31308730 00	498729000			-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kab. Padang Lawas Utara			1,965,00 0,000	DINAS PERHUBUN GAN
2.15 .02. 2.02 .000 1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																			

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				0 Unit	30 Unit	0	0	52275000	52275000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			64,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				38 Unit	61 Unit	233,026,000	233,840,000	681,313,000	448,287,000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONS UMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				0 Unit	0 Unit	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				190 Unit	351 Unit	2,399,118, 000	2,397,28 5,000	2,397,285, 000	-1,833,000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU) PBJT- KONS UMS I TENAG A LISTRI K DARI SUMB ER LAIN	-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			1,800,00 0,000	DINAS PERHUBUN GAN
	2.15 .02. 2.03	Pengelola an Terminal Penumpang Tipe C	Pembanguna n Terminal Tipe C				1 Sub Kegi atan	0 Sub Kegiata n	0	0	0	0			-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan	Masyar akat		1,000,00 0	DINAS PERHUBUN GAN
	2.15 .02. 2.03 .000 1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C																		
			Jumlah Rencana Pembanguna n Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				1 Dok ume n	0 Dokum en	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			1,000,00 0	DINAS PERHUBUN GAN
	2.15 .02. 2.04	Penerbitan Izin Penyeleng garaan dan Pembangu nan Fasilitas Parkir	Operasional Pelaksanaan Penyelenggar aan Perparkiran yang Lancar				2 Sub Kegi atan	1 Sub Kegiata n	351,288,6 00	351,288, 600	339,175,2 00	(12,113,400)			-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan	Masyar akat Penggu na Kender aan Bermot or		151,000, 000	DINAS PERHUBUN GAN

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

2.15 .02. 2.04 .000 1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																			
		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			150,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2.15 .02. 2.04 .000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																			
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	351,288,600	351,288,600	339,175,200	-12,113,400	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			1,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

	2.15 .02. 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2 Sub Kegiatan	0 Sub Kegiatan	0	0	0	0			-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan	Dinas Perhubungan		0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15 .02. 2.05 .000 1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				0 Unit	0 Unit	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15 .02. 2.05 .000 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Orang	0 Orang	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15 .02. 2.05 .000 3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor																		

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				0 Unit	0 Unit	0	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				0 Unit	0 Unit	0	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANS FER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																			

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

			<i>Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>				0 Lap oran	0 Lapora n	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas</i>				3 Sub Kegi atan	1 Sub Kegiata n	1,017,525,600	1,017,525,600	969,072,000	-48,453,600			-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan	Dinas Perhubungan		38,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>				12 Lap oran	12 Lapora n	1,017,525,600	1,017,525,600	969,072,000	-48,453,600	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			1,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			1,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			35,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

2.15 .02. 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Peningkatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalulintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				-	2 Sub Kegiatan	387,628,800	387,628,800	363,402,000	-24,226,800			-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kab. Padang Lawas Utara		3,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15 .02. 2.07 .000 5	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin																		
		Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi				2 Orang	2 Orang	24,226,800	24,226,800	24,226,800	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			1,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15 .02. 2.07 .000 6	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin																		
		Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				12 Laporan	12 Laporan	363402000	363402000	339175200	-24226800	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			2,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15 .02. 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pengawasan Keselamatan LLAJ di jalan				2 Sub Kegiatan	0 Sub Kegiatan	0	0	0	0			-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan	Masyarakat Pengguna Jalan di Kab. Padang Lawas Utara		2,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

2.15 .02. 2.08 .000 4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggar aan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Ko ta				0 Lap oran	0 Lapora n	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			1,000,00 0	DINAS PERHUBUN GAN
2.15 .02. 2.08 .000 7	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum																			
			Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				0 Lap oran	0 Lapora n	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			1,000,00 0	DINAS PERHUBUN GAN
2.15 .02. 2.09	Penyediaa n Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Peningkatan Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang/ atau barang					1 Sub Kegi atan	1 Sub Kegiata n	30,720,00 0	30,720,0 00	121,082,0 00	90,362,000			-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan	Pengus aha Angkut an Umum		41,000,0 00	DINAS PERHUBUN GAN

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

2.15 .02. 2.09 .000 2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	2 Laporan	30,720,000.0	30,720,000.0	121,082,000.0	90,362,000.0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			40,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15 .02. 2.09 .000 3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
		Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				0 Unit	0 Unit	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			1,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15 .02. 2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Sub Kegiatan	0 Sub Kegiatan	0	0	0	0			-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan	Dinas Perhubungan		1,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			1,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1 Sub Kegiatan	0 Sub Kegiatan	0	0	0	0			-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan	Dinas Perhubungan		1,000,000.00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			1,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota																			

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang				2 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	29,780,000.0	26,780,000.0	19,180,000.0	-10,600,000.0			-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan	Masyarakat Pengguna Kenderaan Bermotor		31000000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			1,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

	2.14 .000 3																			DINAS PERHUBUN GAN
			Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggar aan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Ko ta dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				100 Unit	50 Unit	29780000	2678000 0	19180000	-10600000	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			30,000,0 00	
	2.15 .02. 2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Peningkatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko ta				2 Sub Kegi atan	0 Sub Kegiata n	0	0	0	0			-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan	Dinas Perhub ungan		2,000,00 0	DINAS PERHUBUN GAN
	2.15 .02. 2.16 .000 2	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

			Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			1,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	0 Laporan	0	0	0	0	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Percepatan Pemerataan Infrastruktur Berbasis Lingkungan			1,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H								7,324,074,278.00	7,277,134,218.00	7,557,052,392.00	177,088,576,008							6,184,363,991	

BAB IV PENUTUP

Pembangunan di bidang Perhubungan pada akhirnya merupakan upaya untuk memenuhi hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh akses atas kebutuhan memperoleh akses jasa Perhubungan, oleh karena itu pembangunan di bidang Perhubungan harus dipandang suatu investasi dalam mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan pembangunan ekonomi dan mencerdaskan kehidupan masyarakat Padang Lawas Utara yang tertib, aman, patuh dalam berlalu lintas serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Keberhasilan pembangunan bidang Perhubungan merupakan indikator keberhasilan pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 disusun mengacu pada Perubahan RKPD, Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024 sd 2026, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 Triwulan II untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara, merupakan daftar prioritas kegiatan yang telah melalui tahap sinkronisasi prioritas pembangunan bidang Perhubungan.

A. Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara yang didalamnya mencakup penjabaran Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Perhubungan.

Perubahan Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian dari semua pihak dan tersedianya anggaran. Adanya Perubahan Renja ini diharapkan agar Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan

berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

B. Kaidah-Kaidah Dalam Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Di dalam Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kab. Padang Lawas Utara tahun 2025 memerlukan waktu yang sangat panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- b. Di dalam Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kab. Padang Lawas Utara tahun 2025 masih jauh dari sempurna, terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pemahaman tentang tata cara penyusunan masih berbeda-beda

- c. Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kab. Padang Lawas Utara tahun 2025 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya (RPJMN, RPJMD Provinsi, RPD Kabupaten, Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Renstra SKPD).

C. Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan SKPD untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks seperti pelatihan, bimtek, sosialisasi serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan kinerja aparatur perencana
- b. Aparatur perencana Dinas Perhubungan Kab. Padang Lawas Utara yang ada saat ini dari sisi kuantitas sangat kurang, hal tersebut akan berakibatnya bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga dianggap perlu untuk menambah pegawai agar rasio pekerjaan dan jumlah pegawai menjadi berimbang
- c. Menerapkan system Reward and Punishment terhadap seluruh staf aparatur dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja
- d. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan.

GUNUNGTUA, 28 Juli 2025

**Pt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



**M. KADDAFI NASUTION, S.STP, MM
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP. 19840824 200312 1 001**